

Peran Akuntansi Manajemen dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Sektor Keluarga Berencana Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Ade Rahmat^{1*}, Devi Maya Sofa²

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia;

²Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan kualitas layanan publik pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara dengan Koordinator Lapangan, Staf Administrasi, dan Petugas Lapangan KB serta observasi langsung terhadap administrasi proses serta kegiatan pelayanan KB MKJP di lapangan seperti PSA (Pelayanan Sejuta Akseptor), HUT IBI (Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia), dan Hari Kartini. Data sekunder diperoleh dari dokumen Buku Kas Umum (BKU) tahun 2024 yang menunjukkan rincian penggunaan anggaran kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen dijalankan terutama dalam bentuk perencanaan anggaran, pencatatan manual menggunakan BKU, pengendalian kegiatan melalui evaluasi rutin, dan pelaporan keuangan yang transparan. Pengelolaan anggaran yang terarah membantu kegiatan pelayanan berjalan efisien dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan teori akuntansi manajemen sektor publik, yang menekankan desain perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Kata kunci

Akuntabilitas Keuangan; Kualitas Layanan Publik; Pelayanan Keluarga Berencana; Pengelolaan Anggaran Publik

Abstract

This study aims to analyze the role of management accounting in improving the quality of public services at the Family Planning Counseling Center (Balai Penyuluh KB) in Situjuah Limo Nagari District. The research employed a descriptive qualitative method through interviews with the Field Coordinator, Administrative Staff, and Family Planning Field Officers, as well as direct observations of administrative processes and long-acting contraceptive service activities in the field, such as the PSA (One Million Acceptors Service), the Indonesian Midwives Association Anniversary (HUT IBI), and Kartini Day programs. Secondary data were obtained from the 2024 General Cash Book

Korespondensi
Ade Rahmat
adeamat026@gmail.com

(BKU), which contains detailed records of budget utilization. The findings indicate that management accounting is implemented primarily through budget planning, manual recording using the BKU, activity control through routine evaluations, and transparent financial reporting. Structured budget management supports efficient service delivery and improves community satisfaction. These results align with public-sector management accounting theory, which emphasizes planning, control, and accountability in the provision of public services.

Keywords

Financial Accountability; Quality of Public Services; Family Planning Services; Public Budget Management

Pendahuluan

Pelayanan publik adalah pilar utama dalam melaksanakan pemerintahan yang baik karena pelayanan publik mencerminkan efektivitas, kualitas dan profesionalitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Menurut (Sudarmanto *et al.*, 2020) mengatakan bahwa manajemen sektor publik yang baik harus dituntut memiliki sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian untuk mewujudkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Seperti lembaga pemerintahan di Indonesia yaitu sektor Keluarga Berencana (KB) peningkatan kualitas pelayanan publik adalah isu penting yang terus di upayakan dan memiliki peran strategis dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Karim, 2021).

Agar pelayanan publik menjadi efektif, penerapan akuntansi manajemen adalah sesuatu yang penting dalam organisasi publik. Menurut (Syamil *et al.*, 2023) memaparkan bahwa akuntansi manajemen merupakan sistem informasi yang membantu manajer dalam merancang perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan agar tujuan organisasi terwujud secara efisien. Penelitian menurut (Biduri, 2018) menekankan bahwa penerapan akuntansi di sektor publik harus sesuai dengan kaidah akuntabilitas publik, seperti kemampuan lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen bukanlah sekedar alat pencatatan, melainkan alat strategis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menfokuskan akuntansi manajemen di lingkungan lembaga pemerintahan. Menurut penelitian (Rizal, 2025) menyampaikan bahwa pengendalian manajemen yang efektif dapat meningkatkan transparansi keuangan di lembaga pemerintahan. Berdasarkan penelitian dari (Qisthy and Putri, 2025) menjelaskan penerapan akuntansi manajemen sektor publik dapat berkontribusi dalam pengelolaan dana dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintahan. Namun, sejauh ini penelitian di bidang Keluarga Berencana masih sedikit yang membahas keterkaitan langsung antara penerapan akuntansi manajemen dengan kualitas layanan publik di bagian operasional. Penelitian lainnya hanya berfokus pada pelaporan keuangan (Andi Patotori Arismunandar, Ahmad Irza Muhafidz and Bakri Bakri, 2025) atau peningkatan kinerja aparatur secara umum (Santi, 2025).

Dari hasil awal wawancara yang dilakukan di Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuh Limo Nagari dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa proses akuntansi manajemen dan pelaporan masih dilakukan secara manual dan bergantung pada kebijakan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun begitu, penerapan akuntansi manajemen terlihat dari beberapa aktivitas berupa perencanaan, pengendalian anggaran, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB seperti salah satu program pelayanan KB gratis kepada masyarakat yang bernama Pelayanan Sejuta Akseptor (PSA). Jika dilihat lebih dalam terkait kegiatan di Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuh Limo Nagari ditemukan banyak kegiatan yang berkontribusi kepada masyarakat. Dapat disimpulkan sudah terdapat potensi penerapan akuntansi manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB.

Berdasarkan tinjauan literatur dan temuan-temuan awal tersebut dapat diidentifikasi adanya gap penelitian karena sekian banyak penelitian akuntansi manajemen sektor publik belum mengaitkannya secara langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik di sektor keluarga berencana. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada tataran makro (pemerintah kabupaten atau kementerian). Kajian di tingkat mikro seperti Balai Penyuluhan KB masih sangat terbatas sehingga penelitian ini memiliki kebaruan meneliti empiris peran Akuntansi Manajemen pada unit pelaksana teknis tingkat kecamatan dengan fokus pendekatan kualitatif dalam menggali hubungan antara system akuntansi, akuntabilitas serta mutu pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor keluarga berencana Kecamatan Situjuah Limo Nagari?.

Penelitian ini akan diarahkan pada menganalisis peran Akuntansi Manajemen dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan kuatnya literatur mengenai akuntansi manajemen sektor publik, dan manfaat praktis pada tingkat instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan mutu pelayanan keluarga berencana pada tingkat kecamatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara dalam peran akuntansi manajemen terhadap peningkatan kualitas layanan publik di sektor keluarga berencana, khususnya pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara dan observasi guna menggambarkan gejala atau fenomena nyata secara alamiah dari lapangan yang peneliti teliti melalui pengalaman dan pandangan para pelaksana kegiatan. Sesuai dengan penelitian (Syamil *et al.*, 2023) metode kualitatif merupakan pendekatan yang berorientasi pada makna di balik data dan menekankan pentingnya memahami proses manajerial yang terjadi dalam praktik organisasi publik. Demikian disampaikan juga oleh (Sudarmanto *et al.*, 2020) bahwa dalam penelitian manajemen sektor publik, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat dilakukan untuk menelusuri perencanaan, pengendalian, dan pelaporan anggaran di lembaga pemerintah dengan terlebih dahulu memperhatikan konteks sosial dan administratif yang melingkupinya.

Penelitian ini dilakukan di Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi ini dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan KB kepada masyarakat dan telah menerapkan sistem pencatatan serta pelaporan keuangan berbasis prinsip akuntansi manajemen. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 27 Oktober sampai 15 November 2025, diawali dengan kegiatan wawancara bersama Koordinator Lapangan Balai Penyuluh KB, Staf Administrasi, dan Penyuluh KB dan pengumpulan data terkait kegiatan selama satu tahun terakhir, yaitu tahun 2024. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan, catatan kegiatan, serta dokumentasi pelaksanaan program KB yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti Pelayanan KB MKJP Gratis melalui kegiatan Pelayanan Sejuta Akseptor (PSA), Pelayanan KB MKJP dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia (HUT IBI), dan Pelayanan KB MKJP dalam rangka Hari Kartini.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan Koordinator Lapangan dan Staf Administrasi dan Penyuluh KB guna memahami bagaimana proses akuntansi manajemen diterapkan pada tahap perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan. Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa laporan anggaran, laporan realisasi kegiatan, serta arsip pelaksanaan program yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan KB gratis pada tahun 2024. Sejalan dengan (Biduri, 2018), data sekunder dalam penelitian sektor publik terutama dapat membantu mengverifikasi informasi keuangan guna memastikan akuntabilitas kegiatan pelayanan publik.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman dan persepsi pegawai terhadap penerapan akuntansi manajemen dalam kegiatan pelayanan KB. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan lapangan, serta interaksi antara petugas dan masyarakat penerima manfaat. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan kegiatan tahunan dan data realisasi anggaran Balai Penyuluh KB. Dokumentasi akuntansi manajemen publik, menurut (Qisthy and Putri, 2025), dapat digunakan sebagai dasar penilaian efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mengelola dana publik.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah seluruh informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, yaitu merencanakan anggaran, mengendalikan kegiatan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Setiap temuan diinterpretasikan berdasarkan teori akuntansi manajemen sektor publik yang dikemukakan oleh (Judijanto and Afandy, 2024) yang menegaskan bahwa pengukuran kinerja dan akuntabilitas lembaga publik harus dikaitkan dengan sistem pengelolaan manajerial secara efisien. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen kegiatan. Cara ini dilakukan agar hasil penelitian mencerminkan kondisi lapangan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen di Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuh Limo Nagari berlangsung melalui proses perencanaan, pengendalian, dan pelaporan anggaran yang mengikuti ketentuan Dinas DPPKBPPA Kabupaten Lima Puluh Kota. Perencanaan anggaran dilakukan di tingkat kabupaten, namun staf administrasi tingkat kecamatan tetap melaporkan alokasi rinci sesuai kebutuhan kegiatan, seperti terlihat pada dokumen Buku Kas Umum (BKU) Pelayanan Sejuta Akseptor (PSA) dengan total anggaran Rp 9.987.500 yang terbagi dalam biaya makan minum, jasa tenaga medis, dan transport akseptor. Hasil wawancara mengungkap bahwa staf administrasi berperan dalam menentukan alokasi anggaran dan memastikan kesesuaian realisasi dengan aturan yang berlaku. Observasi peneliti memperlihatkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan menggunakan BKU manual, dibantu dengan perangkat lunak Excel untuk merapikan jumlah anggaran sebelum dicetak menjadi laporan resmi. Setiap bukti transaksi seperti kuitansi jasa medis, kuitansi makan-minum, daftar hadir peserta, serta daftar tenaga medis diarsipkan rapi dalam map dokumentasi, kemudian diverifikasi oleh staf administrasi dan Koordinator Lapangan sebelum dikirim ke Dinas Kabupaten.

Laporan keuangan dilakukan secara manual dan diantarkan langsung ke Dinas Kabupaten. Meskipun pernah terjadi perubahan kebijakan yang datang tiba-tiba dari kabupaten, staf administrasi menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak mengubah nominal anggaran yang telah direalisasikan dan mereka mampu menyesuaikan laporan dengan cepat. Dari sisi pelaksanaan kegiatan, hasil wawancara dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menunjukkan bahwa kegiatan PSA, HUT IBI, dan Hari Kartini berjalan lancar dan mencapai target pelayanan karena dukungan anggaran yang cukup. Observasi lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat datang secara tertib, petugas KB mengarahkan peserta ke ruang konsultasi, dan tenaga medis bekerja secara bergantian dalam pemasangan alat kontrasepsi IUD dan implant. Konsumsi bagi peserta dan tenaga medis tersedia sesuai alokasi anggaran. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, terutama karena program KB MKJP ini memberikan pelayanan gratis tanpa memerlukan BPJS. Evaluasi rutin dilakukan oleh seluruh pegawai kantor KB (Koordinator Lapangan, Staf Administrasi, PLKB, Operator Layanan) untuk menilai efektivitas kegiatan dan menjadi dasar perbaikan untuk program berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa akuntansi manajemen telah diterapkan dalam bentuk pengalokasian anggaran, pencatatan manual berbasis BKU, pengendalian melalui evaluasi bulanan, dan penggunaan anggaran yang terarah sesuai dengan kebutuhan layanan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib dan

transparan mendukung kelancaran program KB MKJP dan menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap layanan KB di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuah Limo Nagari memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Hasil ini sesuai dengan pengertian akuntansi manajemen sektor publik yang dikemukakan oleh (Biduri, 2018) bahwa akuntansi tidak hanya berperan pencatat transaksi, tetapi juga perencanaan, pengendalian, serta evaluasi penggunaan anggaran sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pada penelitian ini, meskipun anggaran ditetapkan oleh Dinas Kabupaten, staf kecamatan tetap menerapkan prinsip perencanaan untuk menetapkan alokasi biaya secara rinci guna mendukung kelancaran kegiatan PSA, HUT IBI, dan Hari Kartini. Hasil ini mendukung pendapat (Sudarmanto *et al.*, 2020) bahwa budget planning harus mencapai target pelayanan publik dalam koridor manajemen sektor publik.

Dari sisi pencatatan dan pelaporan keuangan, penelitian ini mendukung teori (Rizal, 2025) bahwa akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui pencatatan keuangan yang sistematis dan dapat ditelusuri meskipun masih berbasis manual. Penggunaan BKU, pengarsipan bukti transaksi, dan verifikasi laporan menunjukkan adanya sistem akuntansi manajemen yang dijalankan secara konsisten. Selain itu, proses pelaporan manual yang diantarkan langsung ke Dinas Kabupaten juga menunjukkan bentuk pertanggungjawaban langsung yang relevan dengan praktik pemerintahan daerah. Secara umum juga sesuai dengan (Judijanto and Afandy, 2024) mengenai pentingnya transparansi dalam pelaporan anggaran sektor publik guna menjaga akuntabilitas lembaga.

Peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan efisiensi pelayanan juga tampak jelas dari hasil penelitian. PLKB menyatakan bahwa alokasi anggaran yang tepat membuat kegiatan pelayanan berjalan lancar tanpa hambatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Qisthy and Putri, 2025) yang menunjukkan bahwa akuntansi manajemen berfungsi untuk meningkatkan efisiensi organisasi melalui pengendalian biaya dan evaluasi kinerja. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelayanan berlangsung tertib, tenaga medis bekerja efektif, serta konsumsi dan kebutuhan logistik tersedia sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam BKU. Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Pada aspek kualitas layanan publik ini, penelitian ini memperjelas teori (Karim, 2021) bahwa kualitas layanan akan meningkat dengan baik ketika pengelolaan anggarannya tepat sasaran dan dilakukan secara efektif. Hasil penelitian lapangan menunjukkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung dari keberadaan program KB MKJP yang gratis dan gampang dijangkau. Antusiasme di penerimaannya terhadap pelaksanaan kegiatan PSA dan HUT IBI membuktikan bahwa pemberian layanan secara efisien dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh pendapat (Syamil *et al.*, 2023), bahwa aplikasi akuntansi manajemen memerlukan sinergi antarunit organisasi sehingga dapat memberikan pengendalian secara optimal. Itu dibuktikan dengan Koordinator Lapangan berperan menjembatani komunikasi antara petugas lapangan dan kabupaten, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa koordinasi mempengaruhi keberhasilan kegiatan pelayanan KB di kecamatan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa akuntansi manajemen berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan publik melalui perencanaan anggaran, pengendalian kegiatan, pelaporan keuangan yang akuntabel, serta koordinasi lintas peran dalam organisasi. Temuan ini berhasil menjawab rumusan masalah penelitian bahwa penerapan akuntansi manajemen telah mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan KB di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik akuntansi manajemen memainkan peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Praktik akuntansi manajemen dapat dilihat dari proses perencanaan anggaran berdasarkan kebijakan Dinas DPPKBPPA

Kabupaten, alokasi dana oleh staf administrasi berdasarkan kebutuhan kegiatan, dan pengendalian internal melalui evaluasi rutin setiap bulan. Proses pencatatan keuangan secara manual dalam BKU dan penyimpanan bukti transaksi secara sistematis menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas telah berjalan meskipun belum didukung secara digital. Dokumentasi BKU dan hasil observasi menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara tepat untuk makanan dan minuman, layanan medis, serta transportasi bagi penerima layanan, sehingga kegiatan pelayanan keluarga berencana seperti Pelayanan Sejuta Akseptor, HUT IBI, dan Hari Kartini dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target layanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang terarah, transparan, dan sesuai kebutuhan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pelayanan, proses efisien, dan kepuasan masyarakat atas layanan KB yang diberikan. Antusiasme masyarakat dalam kegiatan KB MKJP serta kelancaran koordinasi antarpetugas membuktikan bahwa implementasi akuntansi manajemen memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas dan keberhasilan layanan publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi manajemen bukan hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga instrumen yang mendukung perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas layanan pada organisasi publik tingkat kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Balai Penyuluh KB Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pertama, diperlukan upaya digitalisasi secara bertahap dalam pencatatan dan pelaporan keuangan agar proses administrasi menjadi lebih efisien dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan perlu diwujudkan dengan instrumen formal semacam kuesioner kepuasan masyarakat supaya penilaian mutu layanan mempunyai dasar pengukuran yang lebih objektif. Koordinasi antara Balai Penyuluh KB dengan Dinas DPPKBPPA Kabupaten perlu ditingkatkan sehingga perubahan kebijakan mendadak dapat diminimalkan atau diikuti dengan pedoman yang lebih jelas kepada pelaksana di kecamatan. Pelatihan berkelanjutan bagi staf administrasi dan petugas lapangan sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi manajemen dan pengelolaan anggaran publik. Terakhir, disarankan agar balai KB tetap mempertahankan pola kerja sama lintas peran yakni Koordinator Lapangan, Staf Administrasi, PLKB, dan Operator Layanan dikarenakan sinergi antarpegawai terbukti menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelayanan KB di kecamatan.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memberikan izin, bimbingan, dan dukungan penuh selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan evaluasi ilmiah yang konstruktif sejak tahap awal hingga terselesaikannya penelitian ini.

Daftar Pustaka

Andi Patotori Arismunandar, Ahmad Irza Muhafidz and Bakri Bakri (2025) 'Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo', *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(1), pp. 29–36. Available at: <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.91>.

Biduri, S. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Umsida Press. Available at: <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>.

Judijanto, L. and Afandy, C. (2024) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Karim, R. (2021) *Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

Qisthy, N.A. and Putri, V.S. (2025) 'Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara', *Discoveries in Economics and Accounting Studies*, 1(1), pp. 9–12.

Rizal, I. (2025) 'Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Instansi Pemerintah', *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), pp. 1183–1192. Available at: <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1221>.

Santi, E. (2025) *Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mandailing Natal*. Universitas Medan Area.

Sudarmanto, E. *et al.* (2020) *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Syamil, A. *et al.* (2023) *Akuntansi Manajemen: Konsep-Konsep dasar Akuntansi Manajemen Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.